

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Otonomi daerah mencakup hak, wewenang, serta tanggung jawab yang dimiliki oleh wilayah otonomi dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintahan dan kebutuhan publik setempat sesuai hukum dan aturan yang terkait khususnya Pasal 1 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Republik Indonesia. Melalui adanya kewenangan otonom, setiap wilayah di Indonesia dapat mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangannya secara mandiri. Dengan demikian, sebagai acuan dalam mengatur dan mempertanggungjawabkan dana wilayah, diterbitkan PP No. 58 Tahun 2005 mengenai tata kelola fiskal daerah. Tujuan dari peraturan ini dalam rangka mewujudkan pengelolaan kinerja fiskal daerah yang lebih bertanggung jawab, terbuka, dan efisien.

Menurut Mardiasmo (2018), kinerja fiskal pemerintah daerah mencakup pengelolaan penerimaan dan pengeluaran anggaran yang harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Kinerja keuangan yang baik akan tercermin dari kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan. Dalam konteks otonomi daerah, penting untuk diperhatikan bahwa pengelolaan keuangan yang baik mempengaruhi stabilitas ekonomi daerah dan juga kualitas hidup masyarakat. Menurut Halim (2008), analisis rasio keuangan berbasis APBD berperan sebagai salah satu metode guna mengukur kinerja fiskal pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya yang telah dianggarkan serta direalisasikan. Analisis rasio keuangan merupakan suatu perhitungan yang menggunakan laporan keuangan digunakan untuk menilai kondisi kinerja fiskal pemerintah daerah.

Menurut Mahmudi (2019), terdapat berbagai rasio keuangan digunakan sebagai alat ukur kinerja fiskal pemerintah daerah, di antaranya rasio kemandirian, ketergantungan, derajat desentralisasi, efisiensi keuangan, efektivitas pendapatan asli daerah, varians anggaran pendapatan, pertumbuhan pendapatan, efisiensi belanja, varians belanja, serta pertumbuhan belanja daerah.

Pemerintah Kabupaten Sleman merupakan badan pemerintahan yang melaksanakan fungsi pemerintahan serta bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara struktur pemerintahan, Kabupaten Sleman memiliki 17 kapanewon, 86 kalurahan, serta 1.212 padukuhan. Pemerintah Kabupaten Sleman termasuk wilayah yang memiliki potensi besar dalam melaksanakan fungsi otonomi daerah. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan tingginya jumlah penerimaan daerah Kabupaten Sleman, yang menjadi penunjang utama penerimaan daerah dalam mendanai berbagai pengeluaran, diantaranya pengeluaran operasional, pengeluaran investasi, pengeluaran darurat, dan penyaluran dana transfer.

Tabel 1. 1 Realisasi APBD Kabupaten Sleman Tahun 2020-2023  
(dalam miliar rupiah)

URAIAN	TAHUN			
	2020	2021	2022	2023
<b>PENDAPATAN</b>				
Pendapatan Asli Daerah	788,25	803,68	1.061,06	1.130,16
Pendapatan Transfer	1.617,14	1.968,38	1.938,61	1.943,93
Pendapatan Lain-lain yang Sah	135,66	21,27	6,31	9,52
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.541,05</b>	<b>2.793,33</b>	<b>3.005,98</b>	<b>3.083,61</b>
<b>BELANJA</b>				
Belanja Operasi	1.952,37	1.949,95	2.195,79	2.284,95
Belanja Modal	361,07	433,65	466,44	348,28
Belanja Tak Terduga	20,16	27,61	18,23	14,59
Belanja Transfer	198,57	303,10	360,00	464,89
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.532,17</b>	<b>2.714,31</b>	<b>3.040,47</b>	<b>3.112,71</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>8,88</b>	<b>79,02</b>	<b>(34,49)</b>	<b>(29,09)</b>

*Sumber: APBD Kabupaten Sleman (Diolah, 2023).*

Mengacu pada Tabel 1.1 di atas, penerimaan daerah Kabupaten Sleman selama periode 2020 hingga 2023 menunjukkan peningkatan yang mengarah pada hal positif. Hal tersebut mengindikasikan bahwa Kabupaten Sleman mampu mengelola sumber-sumber pendapatan daerahnya dengan baik, terutama setelah menghadapi masa pandemi COVID-19. Selain itu ditinjau dari aspek pengeluaran daerah yang mencakup pengeluaran operasional, pengeluaran investasi, pengeluaran darurat, dan dana transfer, terlihat bahwa terdapat peningkatan jumlah belanja daerah di setiap tahunnya. Kondisi ini menunjukkan upaya daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Surplus keuangan yang di capai Kabupaten

Sleman pada tahun 2020-2021 mencerminkan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien, meskipun terjadi defisit pada tahun 2022-2023 akibat ketidakseimbangan antara pendapatan dan belanja, di mana total pengeluaran yang dilakukan melebihi total penerimaan yang diperoleh.

Kinerja fiskal daerah Kabupaten Sleman dalam pengelolaan anggaran daerah tersebut perlu dianalisis untuk menentukan seberapa efektif pemerintah daerah dalam menjalankan wilayah otonomi apakah telah mengelola keuangan dengan baik. Hasil dari analisis kinerja keuangan daerah dapat dimanfaatkan untuk menilai sejauh mana keberhasilan pengelolaan keuangan daerah serta dalam upaya peningkatan pada periode mendatang. Untuk mengukur sejauh mana kemampuan keuangan, dapat dilakukan analisis rasio. Objek yang diteliti termasuk dalam sektor publik, maka analisisnya menggunakan beberapa rasio, meliputi rasio kemandirian keuangan, ketergantungan keuangan, derajat desentralisasi keuangan, efisiensi PAD, dan efektivitas PAD.

Mengacu uraian di atas, maka penulis bermaksud untuk menilai tingkat kinerja keuangan Kabupaten Sleman dengan memanfaatkan rasio keuangan daerah. Sehubungan dengan uraian di atas, penulis memilih melakukan penelitian dengan mengambil judul Laporan Tugas Akhir **“ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN ANGGARAN 2020-2023”**.

## **1.2 CAKUPAN PEMBAHASAN TUGAS AKHIR**

Mengacu pada uraian latar belakang di atas, permasalahan dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini terletak pada bagaimana kinerja keuangan daerah Kabupaten Sleman selama periode anggaran 2020-2023. Dengan demikian, pembahasan dalam Tugas Akhir ini meliputi:

1. Bagaimana tingkat kemandirian keuangan Kabupaten Sleman tahun 2020 hingga 2023?
2. Bagaimana tingkat ketergantungan keuangan Kabupaten Sleman tahun 2020 hingga 2023?
3. Bagaimana tingkat derajat desentralisasi keuangan Kabupaten Sleman tahun 2020 hingga 2023?

4. Bagaimana tingkat efisiensi PAD Kabupaten Sleman tahun 2020 hingga 2023?
5. Bagaimana tingkat efektivitas PAD Kabupaten Sleman tahun 2020 hingga 2023?

### **1.3 TUJUAN PENULISAN TUGAS AKHIR**

Mengacu pada cakupan pembahasan di atas, tujuan dari Tugas Akhir ini dapat dirinci sebagai berikut:

1. Mengetahui tingkat kemandirian keuangan Kabupaten Sleman tahun 2020 hingga 2023.
2. Mengetahui tingkat ketergantungan keuangan Kabupaten Sleman tahun 2020 hingga 2023.
3. Mengetahui tingkat derajat desentralisasi keuangan Kabupaten Sleman tahun 2020 hingga 2023.
4. Mengetahui tingkat efisiensi PAD Kabupaten Sleman tahun 2020 hingga 2023.
5. Mengetahui tingkat efektivitas PAD Kabupaten Sleman tahun 2020 hingga 2023.